

FONDASI EKONOMI BERKEADILAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL: PERSPEKTIF ETIKA BISNIS LINTAS AGAMA dan KEARIFAN LOKAL di KAMPUNG BUDDHA PONOROGO

Arlinta Prasetyan Dewi

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

arlinta.pd@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the practice of interfaith business ethics and local wisdom as the foundation for realizing a just economy in the Buddhist Village of Ponorogo, known as a community with religious diversity, tolerance, and strong local wisdom. The study uses a qualitative approach with a case study method, through interviews, observations, and document and literature reviews. The results show that local wisdom in the form of mutual cooperation, water resource management, social forest utilization, and cultural ritual practices have become the basis for strengthening the community economy and a space for actualizing interfaith business ethics values reflected in cooperation between Buddhists and Muslims in daily economic activities, based on the values of honesty, mutual respect, and sharing benefits. The integration of local wisdom and interfaith business ethics gives rise to a just economic pattern that ensures equal access to resources, strengthens social cohesion, and encourages sustainable development. This study concludes that the Buddhist Village represents a model of a multicultural society that has succeeded in building a just economic foundation through religious harmony and local wisdom.*

Keywords: *interfaith business ethics, local wisdom, equitable economy, multicultural society, Sodong Buddhist Village.*

PENDAHULUAN

Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari seluruh aktivitas ekonomi.¹ Namun, dalam realitas sosial Indonesia yang multikultural, pencapaian keadilan ekonomi kerap dihadapkan pada tantangan berupa kesenjangan sosial, diskriminasi kultural, dan rendahnya partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pembangunan ekonomi seringkali masih berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, namun kurang memperhatikan aspek nilai, etika, dan kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat desa. Akibatnya, dimensi moral dan

¹ A R T Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)* (repository.iainpare.ac.id, 2019), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/556/>. 54



spiritual yang sesungguhnya menjadi kekuatan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia mulai terpinggirkan.

Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal dan etika lintas agama memiliki peran signifikan dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sistem nilai yang mengatur hubungan sosial, pengelolaan sumber daya, dan distribusi kesejahteraan.² Demikian pula, etika bisnis lintas agama menjadi ruang dialog nilai yang mempertemukan prinsip moral berbagai keyakinan untuk membangun kerja sama ekonomi yang harmonis. Kolaborasi lintas agama yang dilandasi nilai kejujuran, saling menghormati, dan berbagi manfaat dapat menjadi sarana konkret dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi di tingkat komunitas.

Salah satu contoh nyata praktik ini dapat ditemukan di Kampung Buddha Sodong, Dusun Gelang Kulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Komunitas ini dikenal dengan harmoni sosial antarumat Buddha dan Muslim yang hidup berdampingan secara damai, saling bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan gotong royong, pengelolaan sumber daya air secara kolektif, dan pemanfaatan hutan sosial menunjukkan bagaimana nilai budaya dan agama berpadu dalam membangun ekonomi komunitas yang adil dan berkelanjutan. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena merepresentasikan model pembangunan sosial-ekonomi yang berbasis nilai dan harmoni, bukan semata pada rasionalitas ekonomi modern.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik etika bisnis lintas agama dan kearifan lokal sebagai fondasi terwujudnya ekonomi berkeadilan dalam masyarakat multikultural. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada: identifikasi nilai-nilai etika bisnis lintas agama yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat; penggalian informasi secara mendalam mengenai bentuk-bentuk kearifan lokal yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi komunitas setempat; analisis mendalam yang berkaitan dengan integrasi etika bisnis lintas agama dan kearifan lokal sebagai dasar pembentukan ekonomi berkeadilan di Kampung Buddha Sodong Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dipilih karena mampu menggali makna, nilai dan pengalaman sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat yang beragam secara agama dan budaya. Penelitian ini dilakukan di Kampung Buddha Sodong, Dusun Gelang Kulon, Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Komunitas ini dikenal dengan memiliki toleransi yang tinggi antarumat beragama dan pola ekonomi berbasis gotong royong. Subjek penelitian meliputi tokoh agama (Buddha dan Islam), aparat desa, pelaku ekonomi lokal serta masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci dan masyarakat untuk memahami persepsi dan praktik etika bisnis lintas agama. Observasi partisipatif dengan mengikuti kegiatan ekonomi bersama, ritual budaya dan musyawarah desa. Telaah dokumen dan

² S Mazid, D Prasetyo, and F Farikah, "Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Karakter*, jurnal.uny.ac.id, 2020, <https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/34099>. 16.



literatur yang meliputi arsip desa, catatan kegiatan sosial dan referensi akademik terkait etika bisnis dan kearifan lokal. Setelah data dikumpulkan lalu dilakukan teknik analisis data yang meliputi: reduksi data³ yaitu penyelesaian data relevan dengan fokus penelitian, kategorisasi tema yang dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan dimensi etika lintas agama, kearifan lokal dan ekonomi berkeadilan. Penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola hubungan antar tema. Kemudian, keabsahan data diuji dengan triangulasi data yang mencakup triangulasi sumber dan metode, serta *member checking* kepada informan kunci untuk memastikan interpretasi data sesuai dengan realitas sosial yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi berkeadilan dimaknai sebagai konsep yang menekankan pada pencapaian kemakmuran yang adil dan inklusif, melibatkan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴ Ekonomi berkeadilan mencoba mengharmonikan *kebebasan* individu dengan kepentingan kolektif, di mana aktivitas ekonomi diarahkan untuk kemaslahatan bersama (*public good*) dan keberlanjutan sosial-ekologis.

Konsep ekonomi berkeadilan menempatkan keadilan sosial sebagai inti dari aktivitas ekonomi.⁵ Secara normatif, ekonomi berkeadilan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara merata dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam paradigma ini, ekonomi dipahami bukan semata sebagai sistem pasar, melainkan sebagai sistem sosial yang terikat pada nilai-nilai moral, budaya, dan spiritual masyarakat.⁶

Dalam konteks Indonesia, gagasan ekonomi berkeadilan berakar kuat pada falsafah Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yang menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Prinsip ini mengandung makna bahwa ekonomi harus menjamin kesejahteraan bersama, menolak eksploitasi, serta memperkuat solidaritas sosial. Perspektif ini sejalan dengan prinsip agama dan etika universal, pada agama Islam terdapat prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan), pada ajaran Buddha terdapat prinsip *Right Livelihood* dan karuna (belas kasih) yang menekankan pencarian nafkah tanpa merugikan makhluk hidup lain.

³ S H Sahir, *Metodologi Penelitian* (books.google.com, 2021), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PinKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=ODOZ6ijQ2E&sig=dN9Wp2Soxaj0oS3AX7cUwKJQBrY>.

⁴ S F B Situmorang, R J Siregar, and ..., "Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia," *Innovative: Journal Of ...*, j-innovative.org, 2023, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/362>.

⁵ R F Nurita, "Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan," *Jurnal Cakrawala Hukum*, eprints.unmer.ac.id, 2020, [https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2881/2/PEER REVIEW.pdf](https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2881/2/PEER%20REVIEW.pdf).

⁶ I S Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional," in *Islamic Economics Journal*, academia.edu, 2020, https://www.academia.edu/download/115271317/pdf_59.pdf.

⁷ Z Hasan, "Konsep Ekonomi Pancasila," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran ...*, journal.ibrahimiy.ac.id, 2021, <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/1103>.



Selain itu gagasan ekonomi berkeadilan juga sejalan dengan kearifan local Indonesia yang syarat akan nilai gotong royong, musyawarah dan kebersamaan.⁸

Dengan demikian, ekonomi berkeadilan tidak hanya berbicara tentang redistribusi kekayaan, tetapi juga tentang keadilan relasional, yakni hubungan yang setara, saling menghormati, dan tidak diskriminatif dalam proses produksi maupun konsumsi. Dalam masyarakat multikultural seperti Kampung Buddha Sodong, keadilan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa keadilan sosial lintas agama dan budaya. Etika lintas agama dan kearifan lokal di kampung ini menjadi media penyatuan nilai, yang memungkinkan praktik ekonomi dijalankan atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan kebersamaan.

Teori-teori tentang ekonomi berkeadilan telah banyak dicetuskan oleh tokoh-tokoh dunia. Unsur-unsur utama ekonomi berkeadilan mencakup unsur-unsur yang multidimensional.⁹ Unsur-unsur tersebut seperti:

1. Keadilan Distributif (*Distributive Justice*), pertama kali dicetuskan oleh Aristoteles¹⁰ dan John Rawls.¹¹ Keadilan distributif dimaknai sebagai keadaan yang menyangkut pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi (tanah, modal, pendidikan, teknologi, dan peluang kerja).¹² Keadilan distribusi berarti tidak ada monopoli atau dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu. Semua warga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh hasil yang proporsional dengan kontribusinya.
2. Keadilan Prosedural (*Prosedural Justice Theory*) yang dicetuskan pertama kali oleh John Rawls dan Tyler T.R yang dimaknai sebagai keadaan yang menjamin setiap proses pengambilan keputusan ekonomi dilakukan secara partisipatif, transparan, dan menghormati hak semua pihak. Tidak hanya hasil yang adil, tetapi juga *cara* untuk mencapainya harus adil.
3. Keadilan Komutatif (*Commutative Justice*) oleh Aristoteles yang dimaknai sebagai keadaan yang berkaitan dengan etika dan kejujuran dalam hubungan ekonomi antar individu. Setiap transaksi harus dilakukan dengan saling percaya, tanpa penipuan, tanpa eksploitasi dan tanpa pemaksaan.
4. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dicetuskan pertama kali oleh Howard Zehr¹³ dan John Braithwaite yang berfokus pada pemulihan harmoni sosial dan

⁸ Mazid, Prasetyo, and Farikah, "Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat."

⁹ S Karimi, "Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Neoliberalisme Global," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, ejurnalpancasila.bpip.go.id, 2024, <https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/526>.

¹⁰ F D Pratama, R Pebriansya, and ..., "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat* ..., journal.forikami.com, 2024, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.

¹¹ Y Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, ejournal.ust.ac.id, 2023, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2535>.

¹² R Febriyanti and N B Sapa, "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya," *JSE: Jurnal Sharia* ..., jurnal.staim-probolinggo.ac.id, 2025, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/1883>.

¹³ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. (Scottsdale, PA: Herald Press., 1990).



- keseimbangan jika terjadi ketimpangan atau konflik ekonomi.¹⁴ Dalam konteks masyarakat tradisional, ini sering dilakukan melalui mediasi adat atau kesepakatan komunitas, bukan hanya hukum formal.
5. Keadilan Ekologis (*Ecological Justice / Environmental Justice*).¹⁵ Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Andrew Dobson dan David Schlosberg yang menegaskan bahwa keadilan juga harus mencakup hubungan manusia dengan alam. Eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan keberlanjutan adalah bentuk ketidakadilan terhadap generasi mendatang.
 6. Keadilan Solidaritas (*Solidarity Theory*). Dicetuskan pertama kali oleh Émile Durkheim¹⁶, solidaritas dan gotong royong menjadi elemen khas ekonomi berkeadilan di Indonesia. Solidaritas menciptakan redistribusi sosial secara alami, di mana warga membantu yang lemah tanpa paksaan formal.
 7. Keadilan Spiritual dan Moral Dimensi Moral (*Economy / Spiritual Economy*), dicetuskan pertama kali oleh E. P. Thompson, Max Weber, dan Mubyarto, keadilan ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak lepas dari tanggung jawab moral dan spiritual. Tujuan ekonomi bukan sekadar keuntungan (*profit*), tetapi juga *pahala sosial*, yakni kebaikan yang berdampak bagi orang lain dan lingkungan.¹⁷

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi berkeadilan merupakan sistem ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan ekologis melalui berbagai dimensi keadilan, yaitu keadilan distributif, prosedural, komutatif, restoratif, ekologis, solidaritas sosial, serta keadilan spiritual dan moral. Masing-masing dimensi memiliki dasar teori dari pemikir klasik hingga kontemporer mulai dari Aristoteles, John Rawls, hingga Mubyarto yang bersama-sama menegaskan bahwa keadilan bukan hanya persoalan pembagian hasil ekonomi, tetapi juga menyangkut proses, nilai, dan hubungan antarindividu serta keseimbangan dengan alam. Dengan demikian, ekonomi berkeadilan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan yang inklusif, bermoral, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai kemanusiaan universal dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Potret Sosial dan Multikulturalisme Kampung Buddha Sodong Ponorogo

Kampung Buddha Sodong merupakan komunitas unik di wilayah Ponorogo dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan secara damai. Sekitar separuh penduduknya menganut agama Buddha, sementara sisanya beragama Islam. Meski berbeda keyakinan, kedua kelompok hidup dalam harmoni sosial yang terjaga melalui nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, dan kerja sama ekonomi. Tradisi sosial seperti *kerja bakti*, *sedekah bumi*, dan *ritual tolak bala* dilaksanakan secara bersama tanpa melihat perbedaan agama. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang mengatasi sekat keagamaan.

¹⁴ B Mutafarida, "Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Istithmar*, jurnalfebi.iainkediri.ac.id, 2019, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/129>.

¹⁵ Andrew Dobson, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice* (Oxford University Press., 1998).

¹⁶ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*. (New York: Free Press., 1984).

¹⁷ N Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan Dan Realitas* (Jakarta: LP3ES, 1999).



Keharmonisan sosial tidak hanya ditampilkan pada kegiatan ekonomi dan budaya namun juga pada kegiatan lainnya. Sebagai contoh gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada warga yang meninggal dunia. Baik itu umat Muslim maupun Buddha, mereka saling bergotong royong dalam prosesi pemakaman jenazah maupun kegiatan takziah dan kegiatan kirim doa. Untuk menghormati perbedaan keyakinan masyarakatnya, keranda jenazah yang digunakan tidak bertuliskan atau berlogo apapun yang menunjukkan identitas salah satu agama, karena di Kampung Sodong, perlakuan terhadap jenazah adalah sama, jenazah yang berasal dari umat Buddha tidak dikremasi namun dikebumikan selayaknya umat Muslim. Hal yang berkaitan dengan peralatan pendukung, dihasilkan dari patungan warga secara keseluruhan. Demikian betapa potret sosial masyarakat Kampung Sodong menunjukkan harmonisasi kehidupan multikulturalisme sampai pada tataran kehidupan yang sederhana sekalipun.

Kehidupan yang harmonis juga tercermin dalam pemenuhan kebutuhan hidup berupa air. Air yang digunakan masyarakat Kampung Buddha Sodong untuk memasak, minum, mandi, dan sanitasi lainnya berasal dari sumber air yang terletak di Gunung Deng. Air tersebut berasal dari air hujan yang jatuh di gunung, kemudian mengalir ke tanah, dan akhirnya berangsur-angsur muncul kembali ke tanah melalui sumber-sumber air yang berada di sekitar akar pohon dan batuan di lereng Gunung Deng. Di sekitar sumber air tersebut, dibangun sebuah tandon air yang terbuat dari bata merah berplester. Dari tandon tersebut, air kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk melalui selang plastik dan paralon. Selain itu, air dari lereng Gunung Deng juga disalurkan ke ladang dan sawah penduduk.¹⁸

Dalam prosesnya, warga yang tinggal berdekatan melakukan musyawarah mencari sumber air yang akan dialirkan, material dan dana yang diupayakan bersama. Dalam menemukan tempat sumber air yang cocok, warga dibantu oleh sesepuh desa untuk memimpin ritual penyelamatan agar sumber air tersebut lestari dan berkah. Ritual yang dilakukan bernama slametan keblat papat lima pancer sebagai perwujudan penyatuan manusia dan alam semesta. Masyarakat menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang hidup yang memberi kehidupan, termasuk air sebagai sumber kehidupan, pasti ada yang memberi, yaitu Tuhan atau Sing Mbau Rekso (Yang Maha Menghendaki). Oleh karena itu, masyarakat melakukan ritual sebagai proses membangun hubungan dan permohonan.

Selanjutnya dilakukan gotong royong membuat saluran air ke rumah warga. Pengawasan terhadap sumber air dilakukan secara bergiliran, jika ada permasalahan aliran air pada salah satu warga, maka warga lain berupaya membantu dan menyelesaikannya.

Praktik Etika Bisnis Lintas Agama di Kampung Buddha Sodong Ponorogo

Etika lintas agama ini mengatasi potensi sekat sosial melalui *trust-based economy*, di mana kepercayaan antarindividu menjadi modal utama yang menggantikan mekanisme formal seperti kontrak tertulis atau sanksi hukum. Hal ini selaras dengan pandangan Fukuyama (1995) tentang *high-trust society*, di mana tingkat kepercayaan sosial yang

¹⁸ M. Hanif, F. Chasanatun, A. Wibowo. Local Wisdom Of The Sodong Buddhist Village Community in Water Resources Management. *Journal Budapest International Research and Critisc Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*. Volume 4 Nomor 4 (2021). 8766.



tinggi memperkuat efisiensi ekonomi dan mengurangi biaya transaksi. Di Kampung Buddha Sodong, etika lintas agama berfungsi ganda: sebagai kontrol moral dan sebagai sistem kepercayaan sosial yang menopang stabilitas ekonomi lokal.¹⁹

Dengan demikian, ekonomi berkeadilan di sini terwujud bukan melalui regulasi negara, melainkan melalui etika komunitas. Prinsip “tidak menipu, tidak menindas, dan tidak menguasai” menjadi nilai universal yang diakui lintas agama dan dijadikan dasar dalam transaksi, kerja sama, serta pembagian hasil. Kondisi ini menunjukkan bahwa moralitas lintas agama dapat menjadi kekuatan produktif yang menjaga keadilan ekonomi sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Warga Kampung Buddha Sodong Ponorogo mempraktikkan etika bisnis berbasis nilai kejujuran, kepercayaan dan tanggungjawab sosial. Dalam interaksi ekonomi, pelaku usaha Buddha dan Muslim saling menghormati, menjaga amanah dan menolak praktik curang. Nilai-nilai etis ini tidak hanya bersumber dari ajaran agama, tetapi juga dari pengalaman hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Contohnya, dalam kegiatan pertanian dan perdagangan, warga Muslim membantu kelompok Buddha dalam pengelolaan hasil panen dan sebaliknya. Tidak ada diskriminasi dalam proses jual beli, melainkan semangat saling mendukung demi keberlanjutan ekonomi desa. Nilai-nilai etika lintas agama ini menjadi mekanisme sosial yang menjaga stabilitas dan kepercayaan antarwaraga. Pedagang Muslim dan Buddha sering bertransaksi tanpa kontrak tertulis, tanpa bunga, serta sistem pembagian hasil yang didasarkan pada kontribusi tenaga dan modal, berlandaskan kepercayaan moral dan nilai spiritual masing-masing. Prinsip *kejujuran (satya)* dalam ajaran Buddha dan nilai *amanah* dalam Islam menjadi dasar integritas dalam kegiatan ekonomi. Model ini memperlihatkan bahwa harmoni sosial dan ekonomi dapat dibangun di atas kesadaran moral kolektif yang melintasi batas keyakinan.

Integrasi Etika Bisnis Lintas Agama dan Kearifan Lokal di Kampung Buddha Ponorogo

Kearifan lokal di Kampung Buddha Sodong berperan sebagai sistem sosial yang menopang keberlanjutan ekonomi. Bentuk-bentuk kearifan yang menonjol antara lain: Gotong royong, sebagai bentuk kerja kolektif dalam pembangunan sarana umum, pertanian, dan kegiatan ekonomi produktif. Pengelolaan air dan hutan sosial bersama, yang memastikan pemerataan akses sumber daya alam secara adil. Ritual budaya dan kegiatan keagamaan bersama, yang menjadi sarana memperkuat kohesi sosial sekaligus memperlancar distribusi ekonomi, misalnya melalui sedekah dan konsumsi kolektif. Kearifan lokal ini menjadi mekanisme informal yang menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik antaragama, sekaligus membangun rasa kepemilikan bersama terhadap sumber daya ekonomi.

Nilai-nilai kearifan lokal yang mengakar dan diwariskan secara turun-temurun mendorong, memengaruhi, dan membimbing masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumber daya air. Kearifan lokal tersebut berupa falsafah hidup, ajaran batin, norma adat, pitutur, tabu, pamali, dan ungkapan (*unen-unen*). Tradisi budaya seperti *sedekah bumi* dan *bersih desa* berfungsi sebagai “ritus solidaritas” yang memperkuat

¹⁹ L R Fauroni, K Imam, and E B Wiranto, “Pembudayaan Agilitas Bisnis Pengusaha Muslim, Hindu Dan Konghuchu,” ... *Studi Agama-Agama*, ejournal.uin-suka.ac.id, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/4587>.



ikatan sosial. Melalui ritual ini, ekonomi tidak dipisahkan dari dimensi spiritual. Setiap individu diajak untuk menyadari bahwa kesejahteraan adalah hasil dari kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Kearifan lokal dengan demikian berperan sebagai *modal sosial* yang menumbuhkan partisipasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.

Integrasi antara etika lintas agama dan kearifan lokal di Kampung Buddha Sodong menghasilkan model ekonomi yang dapat disebut sebagai *value-based community economy* atau ekonomi komunitas berbasis nilai. Dalam model ini, prinsip keadilan tidak hanya diukur dari indikator material seperti pendapatan atau aset, tetapi juga dari sejauh mana hubungan sosial terjaga dalam harmoni dan saling percaya. Yang mengedepankan pada Dimensi moral, yang menekankan pentingnya nilai kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi. Dimensi sosial, yang menegaskan partisipasi aktif dan kesetaraan antarwarga tanpa membedakan agama atau status ekonomi. Dimensi ekologis, yang memastikan keberlanjutan sumber daya alam melalui prinsip kelestarian dan keseimbangan. Sinergi antara ketiga dimensi tersebut menciptakan struktur ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.²⁰ Ketika etika lintas agama menjadi fondasi moral, dan kearifan lokal menjadi sistem sosialnya, ekonomi berkeadilan bukan hanya wacana, melainkan realitas yang terbangun dari bawah (*bottom-up development*). Model ini memberikan alternatif bagi paradigma ekonomi modern yang seringkali menekankan pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dimensi moral dan sosial. Sebaliknya, Kampung Buddha Sodong menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan nilai dan budaya lokal justru lebih inklusif, stabil, dan berkeadilan.

Pembahasan

Temuan penelitian mengaskan bahwa etika bisnis lintas agama dan kearifan lokal memiliki peran fundamental dalam membangun ekonomi berkeadilan di masyarakat multikultural. Dalam perspektif teori etika sosial, praktik yang ditemukan di Kampung Buddha Sodong menunjukkan bahwa nilai-nilai moral tidak bersifat eksklusif tetapi dapat menjadi *common ground* bagi kolaborasi antaragama. Secara konseptual, ekonomi berkeadilan tidak hanya menekankan pemerataan distribusi tetapi juga keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam hal ini, etika lintas agama menyediakan panduan moral, sementara kearifan lokal menyediakan struktur sosial untuk mewujudkannya. Integrasi keduanya membentuk model ekonomi berbasis nilai (*value-based economy*) yang relevan dengan karakter bangsa Indonesia. Temuan ini juga memperkuat teori *embedded economy*²¹ yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat, bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan pasar murni tetapi juga oleh norma, nilai dan relasi sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks Kampung Buddha Sodong, praktik ekonomi tidak terlepas dari ritual budaya dan hubungan sosial lintas agama yang memperkuat kohesi komunitas.

²⁰ D G E Praditha and I M B Wibisana, “Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya,” *Jurnal Yusthima*, e-journal.unmas.ac.id, 2024, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/8940>.

²¹ Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, with Introduction by Gareth Dale. (Beacon Press, 2024).



Dengan demikian, ekonomi berkeadilan di masyarakat multikultural hanya dapat dicapai melalui sinergi antara nilai etika, kearifan lokal dan partisipasi sosial. Model yang terbangun di Kampung Buddha Sodong Ponorogo menjadi contoh konkret bahwa pembangunan ekonomi berbasis nilai dapat menciptakan harmoni dan keberlanjutan sosial di tingkat akar rumput atau lokal menuju perubahan tingkat nasional.

Ekonomi berkeadilan dalam konteks Kampung Budha Sodong tidak dibangun melalui kebijakan formal, melainkan tumbuh dari praktik sosial yang berakar pada sebuah nilai. Mekanisme gotong royong, pengelolaan sumber daya bersama dan solidaritas lintas agama menciptakan sistem distribusi yang merata dan mencegah eksklusivitas ekonomi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa harmoni sosial adalah prasyarat bagi ekonomi berkeadilan, bukan sekedar hasilnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berkeadilan harus menempatkan nilai dan budaya lokal sebagai dasar perencanaan. Integrasi antara etika lintas agama dan kearifan lokal dapat dijadikan model replikasi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam memperkuat ekonomi tanpa mengorbankan harmoni sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga sumber inovasi sosial yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Bagan implementasi pemenuhan unsur-unsur keadilan ekonomi di Kampung Buddha Sodong Ponorogo sebagai berikut:

Keadilan distributif	Sistem pengelolaan air dan hutan sosial bersama mencerminkan distribusi sumber daya yang adil antarwarga lintas agama.
Keadilan Prosedural:	Musyawarah warga dalam menentukan sistem tanam, jadwal panen, atau pembagian hasil tanpa diskriminasi agama atau status sosial.
Keadilan komutatif	Hubungan jual beli dan kerja sama ekonomi antara umat Buddha dan Muslim di Kampung Sodong yang didasari nilai kejujuran dan saling menghormati.
Keadilan Restoratif	Penyelesaian konflik lahan atau hasil panen melalui musyawarah lintas tokoh agama dan adat.
Keadilan Ekologis	Pengelolaan hutan sosial di Kampung Sodong yang menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam
Keadilan Solidaritas	Gotong royong dalam membangun fasilitas umum dan saling membantu dalam masa paceklik.
Keadilan Spiritual dan Moral	Nilai-nilai Buddhis tentang kasih sayang (<i>karuṇā</i>) dan ajaran Islam tentang <i>zakat</i> , <i>infaq</i> , <i>shadaqah</i> memperkuat moral ekonomi lintas agama di Kampung Sodong

Tabel. I implementasi pemenuhan unsur-unsur keadilan ekonomi di Kampung Buddha Sodong Ponorogo



Temuan dari Kampung Buddha Sodong memiliki implikasi luas bagi strategi pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya pada wilayah multikultural. Pertama, keberhasilan ekonomi berkeadilan di kampung ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak harus seragam, tetapi perlu memperhatikan konteks budaya dan agama lokal. Kedua, pemerintah daerah dapat menjadikan nilai-nilai etika lintas agama dan kearifan lokal sebagai dasar perumusan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Ketiga, pentingnya memperkuat pendidikan nilai lintas agama dan pelestarian budaya lokal agar generasi muda memahami makna keadilan ekonomi tidak hanya sebagai isu ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual. Keempat, temuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat dan harmoni sosial sebagai modal utama.

Dengan demikian, model ekonomi berkeadilan berbasis etika dan kearifan lokal sebagaimana diimplementasikan di Kampung Buddha Sodong dapat menjadi paradigma baru pembangunan desa multikultural di Indonesia. Paradigma yang menempatkan nilai kemanusiaan, harmoni sosial, dan keseimbangan alam sebagai inti ekonomi

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik etika bisnis lintas agama dan kearifan lokal di Kampung Buddha Sodong menjadi fondasi terbentuknya ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat multikultural. Integrasi nilai spiritual dan budaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif tetapi juga adil, inklusif dan berkelanjutan. Kearifan lokal seperti gotong royong, pengelolaan sumber daya bersama dan ritual budaya menjadi wahana aktualisasi nilai etika bisnis lintas agama yang menumbuhkan solidaritas sosial dan kepercayaan ekonomi. Model ini dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan pendekatan pembangunan berbasis nilai dan budaya lokal di wilayah multikultural Indonesia. Kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjamin pemerataan sumber daya, sementara etika lintas agama memberikan arah moral bagi praktik ekonomi. Integrasi keduanya melahirkan model ekonomi berbasis nilai yang tidak hanya relevan bagi masyarakat multikultural, tetapi juga berkontribusi terhadap paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, diharapkan Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan terkait dapat memperkuat kolaborasi dalam pelestarian nilai-nilai lokal dan lintas iman sebagai strategi pembangunan ekonomi berbasis harmoni sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Dobson. *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*. Oxford University Press., 1998.
- Astuti, A R T. *Ekonomi Berkeadilan (Konsep Distribusi Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr)*. Repository.iainpare.ac.id, 2019.
<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/556/>.
- Emile Durkheim. *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press., 1984.
- Fauroni, L R, K Imam, and E B Wiranto. "Pembudayaan Agilitas Bisnis Pengusaha Muslim,



- Hindu Dan Konghuchu.” ... *Studi Agama-Agama*, ejournal.uin-suka.ac.id, 2023.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/4587>.
- Febriyanti, R, and N B Sapa. “Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya.” *JSE: Jurnal Sharia* ..., jurnal.staim-probolinggo.ac.id, 2025. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/1883>.
- Hasan, Z. “Konsep Ekonomi Pancasila.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran* ..., journal.ibrahimy.ac.id, 2021.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/1103>.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press., 1990.
- Husni, I S. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional.” In *Islamic Economics Journal*. Academia.edu, 2020.
https://www.academia.edu/download/115271317/pdf_59.pdf.
- Karimi, S. “Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Neoliberalisme Global.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, ejurnalpancasila.bpip.go.id, 2024.
<https://ejurnalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/view/526>.
- Karl Polanyi. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, with Introduction by Gareth Dale*. Beacon Press, 2024.
- Mazid, S, D Prasetyo, and F Farikah. “Nilai Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Karakter*, jurnal.uny.ac.id, 2020.
<https://jurnal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/34099>.
- Mubyarto, N. *Ekonomi Pancasila: Gagasan Dan Realitas*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Mutafarida, B. “Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah.” *Istithmar*, jurnalfebi.iainkediri.ac.id, 2019.
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/129>.
- Nurita, R F. “Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, eprints.unmer.ac.id, 2020.
<https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/2881/2/PEER REVIEW.pdf>.
- Praditha, D G E, and I M B Wibisana. “Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya.” *Jurnal Yusthima*, ejournal.unmas.ac.id, 2024. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/8940>.
- Pratama, F D, R Pebriansya, and ... “Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat* ..., journal.forikami.com, 2024.
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.
- Restian, A, T Deviana, and Y N E Saputri. “Pengembangan LKS Berbasis Kearifan Lokal Di Malang Untuk Siswa Kelas IV SD.” ... : *Jurnal Pendidikan Dan* ..., ejournal.uksw.edu, 2020. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/2876>.
- Sahir, S H. *Metodologi Penelitian*. Books.google.com, 2021.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PinKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=ODOZ6ijQ2E&sig=dN9Wp2Soxaj0oS3AX7cUwKJQBrY>.



- Situmorang, S F B, R J Siregar, and ... “Teori Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of ...*, j-innovative.org, 2023. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/362>.
- Suhardin, Y. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, ejournal.ust.ac.id, 2023. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/2535>.

